

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi atau kemajuan ekonomi diartikan sebagai peningkatan potensi suatu negara dalam menghasilkan barang dan menyediakan jasa dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari meningkatnya output atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan bahwa perekonomian mampu memanfaatkan sumber daya secara lebih produktif dan efisien. Kondisi meningkatnya ekonomi ini ditandai dengan sejauh mana perekonomian masyarakat yang akan berkembang melalui tambahan pendapatan yang diterima oleh masyarakat pada periode tertentu (Sadono Sukirno, 2006). Analisa perkembangan pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa sangat penting dalam negara atau daerah. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perkapita suatu negara atau daerah itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi secara nasional beberapa tahun kebelakang juga mengalami perlambatan, dikarenakan adanya beberapa fenomena atau kejadian yang memberikan dampak secara signifikan atau langsung pada elemen-elemen yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dampak pandemi Covid beberapa tahun yang lalu masih terasa hingga saat ini. Adanya fenomena tersebut menyerang hampir semua aspek kehidupan, khususnya pada sektor perekonomian. Banyak kegiatan perekonomian yang terputus akibat Covid, ini akibatnya banyak rumah tangga yang tidak mempunyai pemasukan untuk sekian waktu karena

banyak tulang punggung juga yang kehilangan pekerjaannya karena menurunnya produksi.

Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki pertumbuhan ekonomi yang terbilang stabil. Tidak ada penurunan signifikan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Meskipun pada masa pandemi Covid di tahun 2020 kemarin sempat mengalami penurunan di level terendah dari 10 tahun terakhir. Pandemi Covid memang banyak memakan industri-industri unggulan yang berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Atas kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam hal industri dan lainnya, Jawa Timur berhasil keluar dari belenggu pandemi.

Peran pemerintah dalam memberikan kebijakan atau keputusan terhadap suatu wilayah dalam aspek ekonomi memang sangat penting. Hal itu mengacu pada prinsip bahwa pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah, khususnya Jawa Timur menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tersebut. Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur harus dilakukan dengan memperhatikan interaksi antara aspek-aspek atau faktor-faktor makroekonomi seperti halnya *BI Rate* (suku bunga acuan), Indeks Daya Beli (IDB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pengeluaran per-kapita daerah Jawa Timur.

Pengeluaran per kapita merupakan aspek atau tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai suatu kesejahteraan publik disamping pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran perkapita juga dapat menjadi tolak ukur dari standar hidup manusia yang berkaitan dengan pengetahuan dan peluang untuk menghasilkan barang dan jasa (Adelina Sianturi et al., 2023). Hal tersebut dapat dicerminkan ketika setiap individu melakukan berbagai macam upaya untuk merealisasikan

*output* dari pengetahuan dan peluang yang dimiliki. Faktor pengetahuan dan peluang ini jika dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap individu akan mampu meningkatkan pendapatannya. Pendapatan atau *output* yang dihasilkan secara tidak langsung meningkatkan standar hidup individu tersebut. Selain itu, hasil studi yang telah dilakukan oleh (Patriotika, 2015) mengungkapkan bahwa pengeluaran perkapita merupakan ukuran standar hidup manusia yang mencerminkan daya beli masyarakat (*Purchasing Power Powerity*) serta digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara kesejahteraan suatu negara dan status Daya Beli di suatu wilayah.

**Tabel 1. Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Timur 2009-2023**

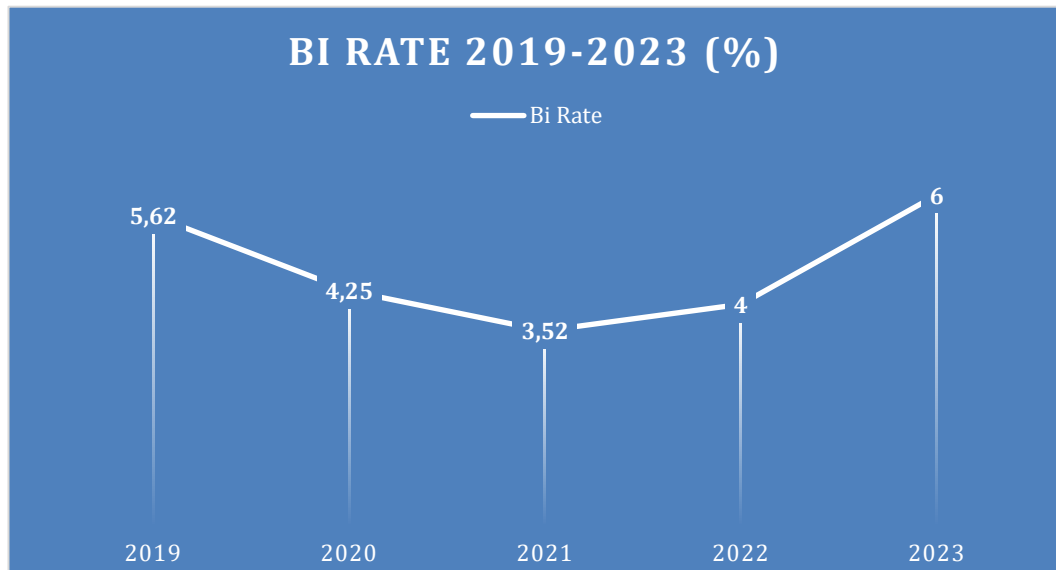
| Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Timur (Ribu Rupiah) |                      |
|--|----------------------|
| Tahun  | PPKPT                |
| 2009   | 640,12 (metode lama) |
| 2010   | 9002,02              |
| 2011   | 9396,2               |
| 2012   | 9797,47              |
| 2013   | 9978                 |
| 2014   | 10012,16             |
| 2015   | 10383,37             |
| 2016   | 10715                |
| 2017   | 10973                |
| 2018   | 11380                |
| 2019   | 11739                |
| 2020   | 11601                |
| 2021   | 11707                |
| 2022   | 11992                |
| 2023   | 13870                |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023*

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, pengeluaran per kapita wilayah ini menunjukkan dinamika pertumbuhan yang menarik dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Periode ini dapat dibagi menjadi tiga fase perkembangan ekonomi yang signifikan. Fase pertama (2009-2014) mencatat lonjakan luar biasa dari Rp640.000 (2009) menjadi Rp9.002.000 (2010), diikuti dengan pertumbuhan stabil hingga Rp10.012.000 (2014). Perubahan metodologi

penghitungan diduga menjadi penyebab utama disparitas data antara tahun 2009 dan 2010 ini. Fase kedua (2015-2019) menunjukkan konsolidasi pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan tahunan sebesar 3,2%, mencapai puncak pra-pandemi di Rp11.739.000 (2019). Fase ketiga (2020-2023) diwarnai oleh dampak pandemi yang menyebabkan kontraksi menjadi Rp11.601.000 (2020), diikuti oleh pemulihan bertahap hingga mencapai rekor tertinggi Rp13.870.000 (2023). Pencapaian tahun 2023 ini merepresentasikan pertumbuhan kumulatif sebesar 2067% sejak 2009, atau rata-rata 21,8% per tahun (jika mengabaikan anomali data 2009).

Besarnya pengeluaran perkapita memang dipengaruhi oleh beberapa aspek-aspek ekonomi lainnya seperti suku bunga (*BI Rate*). *BI Rate* adalah tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai alat atau instrumen kebijakan moneter dan berfungsi sebagai indikator arah kebijakan ekonomi yang diumumkan secara terbuka kepada publik. Tingkat suku bunga acuan (*BI Rate*) ini berperan secara krusial dalam dinamika dan fluktuasi suku bunga di pasar keuangan (Ginting & Hariani, 2023). Peran *BI Rate* sebagai suku bunga acuan bagi bank umum terlihat ketika ada perubahan, baik peningkatan maupun penurunan yang diharapkan berdampak pada perubahan tingkat suku bunga deposito dan pada waktunya akan mempengaruhi pergerakan suku bunga pinjaman (Waljinah, 2013). Peningkatan *BI Rate* secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja perbankan.



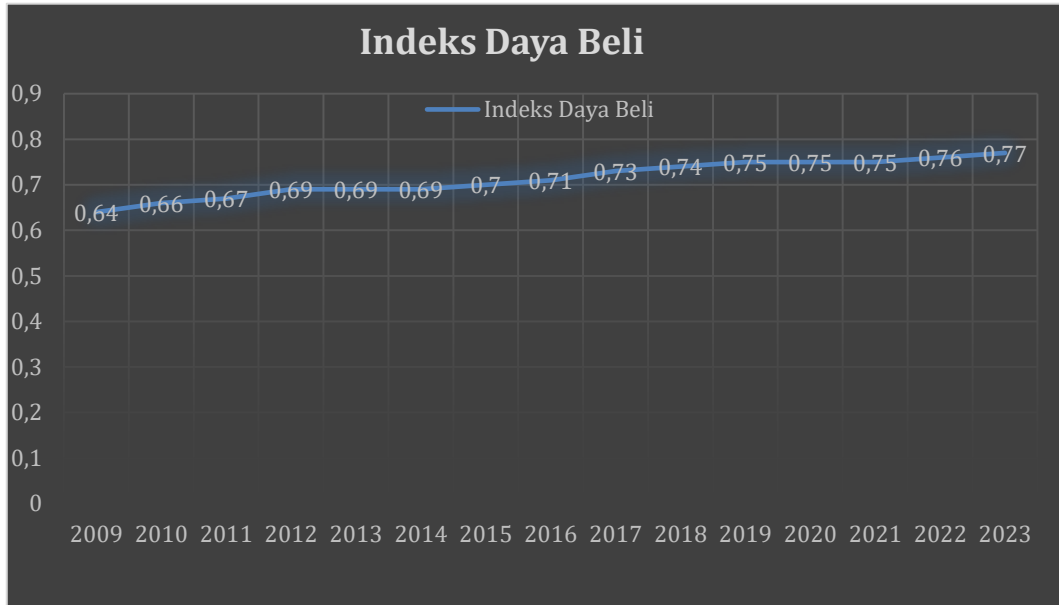
**Gambar 1.1 BI Rate per Tahun, 2023**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023*

Selama lima tahun terakhir (2019-2023), suku bunga acuan Bank Indonesia (BI 7-Day Reverse Repo Rate) mengalami fluktuasi yang signifikan akibat dari adanya perubahan dalam perekonomian global dan lokal. Sekitar kurang lebih empat tahun lalu pada tahun 2019, BI mempertahankan suku bunga di level 6,00% untuk menjaga stabilitas makroekonomi, kemudian menurunkannya secara agresif hingga 4,75% di akhir 2020 sebagai stimulus pandemi COVID-19. Tahun 2021 menjadi periode suku bunga terendah dalam sejarah (3,50%) untuk mendorong pemulihan ekonomi, sebelum terjadi reversal kebijakan moneter pada 2022 dengan kenaikan bertahap hingga 5,50% untuk menekan inflasi yang mencapai 6,5%. Sepanjang 2023, BI mempertahankan suku bunga di level 6,00% sebagai respons terhadap tekanan global dan stabilitas Rupiah, menandai era pengetatan moneter pasca-pandemi. Pola kebijakan moneter ini mencerminkan respons BI yang adaptif terhadap berbagai guncangan ekonomi, dari pandemi hingga krisis geopolitik global, dengan dampak nyata terhadap pertumbuhan kredit, inflasi, dan kurs Rupiah.

Peningkatan suku bunga acuan (*BI Rate*) menyebabkan suku bunga kredit meningkat, membuat pinjaman lebih mahal dan mengurangi konsumsi serta investasi, sementara penurunannya mendorong pinjaman dan belanja. Selain itu, *BI Rate* juga mempengaruhi suku bunga tabungan, di mana kenaikan suku bunga mendorong masyarakat menabung lebih banyak, sedangkan penurunannya meningkatkan konsumsi. Namun, dampaknya terhadap pengeluaran per kapita tidak langsung karena hal ini ditentukan oleh aspek yang lain seperti keadaan ekonomi dan kepercayaan masyarakat.

Faktor ekonomi lain yang berkaitan erat dengan pengeluaran perkapita adalah Indeks Daya Beli (IDB). Indeks Daya Beli (IDB) termasuk salah satu aspek yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu daerah baik yang berkaitan dengan standar hidup maupun kualitas pendidikan (BPS, 2022). Adapun nilai atau indikator terdiri dari beberapa aspek diantaranya yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Adapun nilai Indeks Pendidikan Manusia (IDB) Provinsi Jawa Timur dalam 15 tahun mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup stabil.



**Gambar 2. Indeks Daya Beli, 2023**

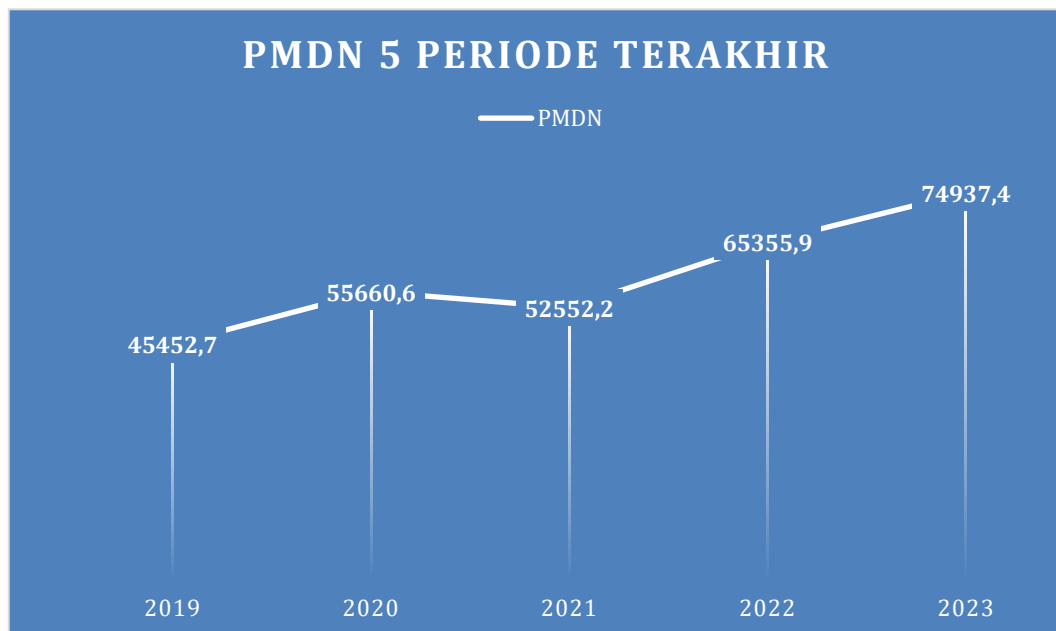
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023*

Indeks daya beli Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2009-2023, dengan nilai naik dari 0,64 menjadi 0,77 atau tumbuh 20,3% dalam 14 tahun. Peningkatan ini terjadi secara bertahap dengan rata-rata kenaikan 0,009 per tahun, meskipun sempat stagnan di level 0,69 selama tiga tahun (2012-2014). Pertumbuhan yang lebih signifikan terlihat sejak 2017, dimana indeks melonjak dari 0,71 menjadi 0,77 pada 2023, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali rata-rata 3,5% per tahun, serta efektivitas program bantuan sosial seperti BLT dan subsidi energi yang mendukung konsumsi masyarakat berpendapatan rendah.

Meski menunjukkan perkembangan positif, indeks daya beli Jawa Timur tahun 2023 sebesar 0,77 masih berada di bawah rata-rata nasional (0,80), mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan antardaerah. Tantangan ke depan adalah mempercepat pemerataan pertumbuhan melalui program padat karya untuk meningkatkan pendapatan riil, sekaligus memperkuat stabilitas harga pangan melalui perbaikan sistem logistik guna mengantisipasi gejolak harga komoditas

global yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat (*WORLD BANK*, 2023) Dengan kebijakan yang tepat, Jawa Timur berpotensi meningkatkan daya beli sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayahnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Asiyan Sri, 2013) dijelaskan bahwa investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) bersama dengan investasi asing dan kegiatan ekspor berjalan secara simultan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Sementara itu, berdasarkan data realisasi PMDN di Jawa Timur terbilang cukup besar, yakni 10.187 proyek senilai 205 juta USD, namun mengalami fluktuasi karena faktor perizinan, infrastruktur, dan kualitas SDM. Seiring dengan meningkatnya pengeluaran per kapita, masyarakat memiliki kemampuan konsumsi yang lebih tinggi, yang mendorong aktivitas ekonomi lokal dan memberikan insentif bagi investor domestik untuk menanamkan modal, sehingga memperkuat siklus positif investasi PMDN dan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.



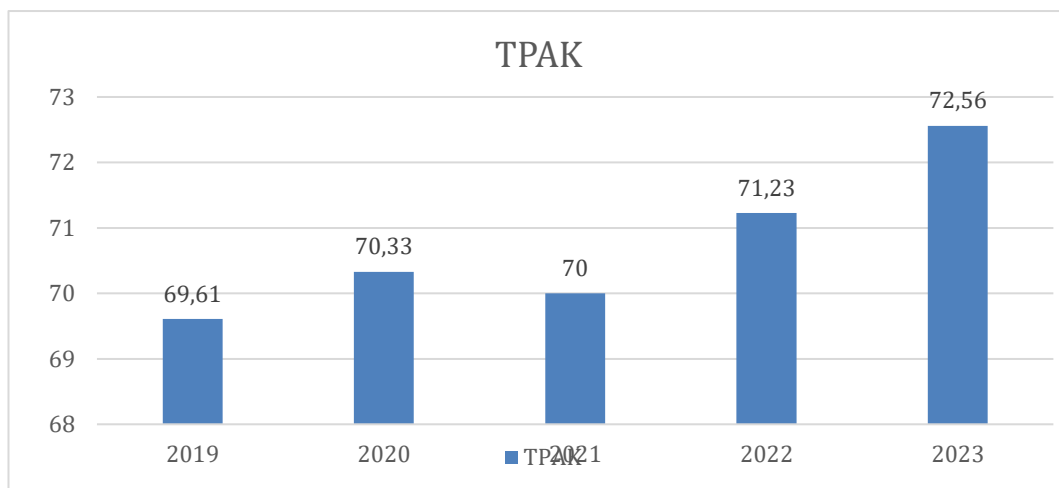
**Gambar 3. Penanaman Modal Dalam Negeri, 2023**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023*



Implementasi PMDN di Jawa Timur menunjukkan tren pertumbuhan positif, dimulai dari Rp45,45 miliar (2019) hingga mencapai rekor Rp74,94 miliar (2023), meskipun sempat mengalami penurunan menjadi Rp52,55 miliar (2021) akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, investasi justru meningkat menjadi Rp55,66 miliar didorong oleh proyek-proyek infrastruktur dan logistik, sementara pemulihan signifikan terjadi di 2022 dengan kenaikan 24,4% (Rp65,36 miliar) seiring pulihnya aktivitas ekonomi. Capaian tertinggi dicatat pada 2023 sebesar Rp74,94 miliar, menandakan pertumbuhan 14,7% dari tahun sebelumnya, didukung oleh proyek hilirisasi industri dan energi terbarukan. Selama kurang lebih lima periode terakhir, PMDN di Jawa Timur mencapai rerata sekitar 13,3%, mencerminkan ketahanan ekonomi dan daya tarik investasi provinsi ini.

Sedangkan pada periode yang sama, faktor ekonomi yang lain seperti rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) provinsi tercatat stabil di kisaran 70%, dengan data 2023 menunjukkan nilai 72,56 %. Sejumlah jurnal menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita atau PDRB per kapita memiliki hubungan signifikan (meski arahnya negatif) terhadap kondisi ketenagakerjaan khususnya tingkat pengangguran namun TPAK justru berperan positif dalam mengurangi pengangguran. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita kerap diiringi peningkatan partisipasi angkatan kerja, karena daya beli yang lebih tinggi merangsang kebutuhan tenaga kerja dan menguatkan kesiapan masyarakat untuk masuk pasar kerja.



**Gambar 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, 2023**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023*

Sepanjang lima tahun terakhir (2019-2023), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 2,95 poin persentase, dari 69,61% menjadi 72,56%, dengan pertumbuhan tahunan tertinggi terjadi pada periode 2022-2023 yang mencapai lebih dari 1,2 poin persentase per tahun. Analisis spasial menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antarwilayah, di mana kawasan industrial seperti Kota Surabaya (76,12%), Kabupaten Gresik (75,84%), dan Kota Malang (74,67%) mencatat TPAK tertinggi, didorong oleh tingginya tingkat alokasi tenaga kerja di bidang manufaktur dan jasa. Sebaliknya, wilayah dengan basis ekonomi agraris seperti Kabupaten Pacitan (65,32%) dan Trenggalek (66,01%) menunjukkan performa yang relatif rendah, mencerminkan keterbatasan penyerapan tenaga kerja di luar sektor pertanian tradisional. Fenomena menarik teramati pada tahun 2020 di mana TPAK justru mengalami kenaikan sebesar 0,72 poin persentase meskipun terjadi pandemi, yang dapat dijelaskan melalui dua faktor utama: ketahanan sektor pertanian sebagai penyumbang utama tenaga kerja (sekitar 40%) dan fenomena migrasi balik pekerja urban ke daerah pedesaan. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang

terfokus pada: (1) percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tertinggal, khususnya kawasan barat Jawa Timur; (2) peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; serta (3) diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer. Data BPS tersebut sekaligus mengkonfirmasi posisi Jawa Timur yang secara konsisten memiliki TPAK di atas rata-rata nasional, mencerminkan karakteristik pasar kerja provinsi yang didominasi oleh sektor-sektor padat karya.

Berdasarkan landasan atau dasar permasalahan yang telah dipaparkan, urgensi untuk dilakukan penelitian yang berjudul “*ANALISIS PENGARUH BI RATE, INDEKS DAYA BELI, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP PENGELUARAN PER KAPITA PROVINSI JAWA TIMUR*” sangatlah tinggi. Hal ini didasari dengan urgensi terkait pemahaman tentang bagaimana dinamika pengeluaran perkapita sebagai indikator kesejahteraan masyarakat berinteraksi dengan unsur-unsur makroekonomi utama seperti suku bunga acuan (*BI Rate*), Indeks Daya Beli, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama 15 tahun terakhir, Provinsi Jawa Timur menunjukkan kestabilan dan pertumbuhan yang relatif positif dalam aspek-aspek tersebut, meskipun sempat terguncang akibat pandemi Covid-19. Namun, hubungan kausalitas antara variabel-variabel tersebut belum dikaji secara menyeluruh dan simultan dalam konteks daerah, khususnya di Jawa Timur. Pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam rangka meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi regional, serta

mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Studi ini diharapkan mampu menjadi kontribusi atau rujukan ilmiah dan praktis bagi pemerintah daerah, pelaku ekonomi, serta akademisi dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis empiris.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah *BI Rate* berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita?
2. Apakah Indeks Daya Beli mempengaruhi pengeluaran per kapita?
3. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempengaruhi pengeluaran perkapita?
4. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mempengaruhi pengeluaran perkapita?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah *BI Rate* berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita.
2. Untuk mengetahui apakah Indeks Daya Beli berpengaruh terhadap pengeluaran perkapita.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap pengeluaran perkapita.
4. Untuk mengetahui apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pengeluaran perkapita?

## **1.4 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah variabel - variabel yang berpotensi mempengaruhi Pengeluaran Perkapita sebagai indikator

kesejahteraan masyarakat di daerah Jawa Timur. Untuk melakukan penelitian yang tepat dan terarah, maka penulisan yang akan dilakukan di penelitian ini adalah:

- a. Peneliti membahas variabel - variabel yang mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Pengeluaran Perkapita di Provinsi Jawa Timur.
- b. Penelitian atau studi ini menggunakan data-data yang berasal dari website Badan Pusat Statistik (BPS) dalam periode 15 tahun, mulai yang terukur dari Tahun 2009 - 2023.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terutama dalam bidang perekonomian, khususnya indikator - indikator yang mempengaruhi Pengeluaran Perkapita. Penulis berharap penelitian dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Perkapita.

### **2. Manfaat Praktis**

Adanya penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan faktor - faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Perkapita, sehingga tujuan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dapat tercapai.